

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Politik merupakan arena dinamis yang membuat aktor-aktor politik dapat menggunakan berbagai strategi untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan. Dalam setiap sistem pemerintahan, baik demokrasi maupun otoritarianisme, politik selalu menjadi wadah bagi individu dan kelompok untuk memperjuangkan kepentingan mereka, membentuk kebijakan, serta mempengaruhi arah pembangunan suatu negara. Sebagai *zoon politicon*, manusia, sebagaimana yang diuraikan oleh Aristoteles secara alami tidak dapat dipisahkan dari politik, karena kehidupan sosialnya selalu melibatkan proses pengambilan keputusan kolektif yang memengaruhi kesejahteraan bersama. Dalam pandangan ini, politik, bukanlah aktivitas yang terpisah dari kehidupan sehari-hari, tetapi merupakan ekspresi dari kehendak manusia untuk mengatur kehidupan bersama secara rasional dan adil. Dalam masyarakat modern, ekspresi politik ini diwujudkan melalui partisipasi warga dalam pemilu, advokasi kebijakan, perdebatan publik, serta bentuk-bentuk perlawanan terhadap kekuasaan yang dianggap tidak sah. Oleh karena itu, politik mencerminkan proses kolektif dalam menegosiasikan nilai, kepentingan, dan distribusi sumber daya di antara berbagai kelompok sosial.

Pemimpin menjadi hal yang utama dalam politik, sebagai pengambil keputusan sekaligus simbol dari orientasi dan kehendak kolektif suatu masyarakat. Kepemimpinan dalam politik tidak hanya menyangkut kemampuan teknis untuk mengelola pemerintahan, tetapi juga mencerminkan kemampuan untuk memobilisasi dukungan, membangun legitimasi, serta menjaga keseimbangan antara berbagai kepentingan yang saling bertentangan. Seorang pemimpin politik berperan penting dalam menerjemahkan aspirasi masyarakat menjadi kebijakan publik, sekaligus menentukan arah ideologis dan moral dari suatu rezim. Oleh karena itu, kualitas kepemimpinan dalam politik sangat menentukan bentuk dan arah kekuasaan yang dijalankan. Dalam konteks ini, relasi antara politik dan kepemimpinan bukan hanya

bersifat fungsional, tetapi juga normatif: pemimpin bukan sekadar pelaku politik, tetapi juga pembentuk etika dan budaya politik suatu bangsa.

Dalam berbagai diskursus politik dan filsafat kenegaraan, sosok pemimpin ideal sering kali digambarkan sebagai figur yang memiliki integritas moral, kapasitas intelektual, serta kepekaan terhadap kebutuhan rakyat. Seorang pemimpin ideal tidak hanya diukur dari efektivitasnya dalam mencapai tujuan politik, tetapi juga dari kemampuannya menjaga nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi. Dalam konteks ini, karakter kenegarawanan menjadi fondasi utama, yang mencakup kebijaksanaan, keadilan, kejujuran, serta komitmen terhadap kepentingan publik di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Heywood, 2013). Kepemimpinan yang dilandasi nilai-nilai kenegarawanan mendorong hadirnya pemerintahan yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat dan stabilitas jangka panjang.

Selain sifat kenegarawanan, demokratisasi juga menjadi elemen penting dalam menilai kualitas seorang pemimpin. Pemimpin yang demokratis adalah mereka yang membuka ruang partisipasi, menghargai keberagaman pendapat, serta menjunjung tinggi supremasi hukum dan hak asasi manusia. Mereka tidak semata-mata menggunakan kekuasaan untuk memperkuat posisi pribadi, tetapi lebih kepada menciptakan mekanisme pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap aspirasi publik. Kepemimpinan semacam ini mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih inklusif dan berorientasi pada kepentingan rakyat.

Dengan demikian, pemimpin ideal dalam konteks demokrasi modern adalah sosok yang mampu memadukan sifat kenegarawanan dan sikap demokratis dalam menjalankan kepemimpinannya. Ia tidak hanya menjadi penguasa yang efektif, tetapi juga menjadi simbol moral dan teladan bagi rakyatnya. Dalam kerangka ini, analisis terhadap praktik politik seorang pemimpin harus mempertimbangkan sejauh mana tindakan-tindakannya mencerminkan nilai-nilai tersebut—apakah kebijakan dan strategi politiknya didasarkan pada pertimbangan etis dan visi kebangsaan, atau justru cenderung pragmatis dan oportunis.

Dalam ilmu politik, *power* merupakan konsep inti yang menjelaskan bagaimana seorang pemimpin mampu memengaruhi, mengarahkan, atau mengendalikan perilaku

orang lain untuk mencapai tujuan politik tertentu. Konsep ini mencakup dua dimensi utama, yaitu kekuatan (*force*) dan kekuasaan (*authority*), yang keduanya sering kali menyatu dalam praktik kepemimpinan.

Dalam konteks kepemimpinan yang ideal, seorang pemimpin negarawan dan demokratis tidak hanya harus memiliki *power* dalam pengertian teknis, tetapi juga harus mampu menggunakan kekuatan (*force*) dan kekuasaan (*authority*) secara etis, legitim, dan proporsional. Kekuatan dalam hal ini bukan semata kapasitas koersif seperti kendali atas aparat, hukum, atau ekonomi, melainkan kemampuan untuk bertindak tegas, cepat, dan efektif dalam menjaga ketertiban, stabilitas, dan kedaulatan negara ketika menghadapi situasi krisis. Pemimpin negarawan menyadari bahwa kekuatan hanyalah alat, bukan tujuan itu sendiri, dan penggunaannya harus senantiasa dipandu oleh kepentingan publik yang lebih besar (Morgenthau, 1948).

Kekuasaan sebagai *otoritas yang sah* merupakan pilar utama dalam kepemimpinan demokratis. Kekuasaan yang ideal bagi seorang pemimpin berasal dari legitimasi, yaitu pengakuan dari rakyat bahwa pemimpin tersebut layak ditaati karena ia menjalankan mandatnya berdasarkan hukum, moralitas publik, dan nilai-nilai bersama. Dalam kerangka ini, pemimpin demokratis tidak memerintah melalui ketakutan, melainkan melalui kepercayaan, partisipasi, dan dialog terbuka dengan warga negara. Kekuasaan tidak hanya dipertahankan melalui paksaan, tetapi juga melalui hegemoni, yaitu kontrol atas wacana dan budaya yang membentuk cara berpikir masyarakat sehingga mereka secara sukarela menerima struktur kekuasaan yang ada (Weber, 1978, Gramsci, 1971). Kekuasaan seperti ini bersifat *konsensual*, bukan *represif*, dan menjadikan pemimpin sebagai pelayan rakyat, bukan penguasa yang absolut.

Seorang pemimpin negarawan menggunakan kekuasaan bukan untuk memperkuat posisi pribadi atau kelompok, tetapi untuk membangun institusi yang kuat dan tatanan politik yang adil. Ia mampu memadukan ketegasan dalam pengambilan keputusan dengan komitmen terhadap prinsip demokrasi seperti transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap perbedaan. Pemimpin yang efektif dan etis tidak hanya mengandalkan kekuatan keras (*hard power*), tetapi juga *soft power*—

kemampuan untuk membujuk, menginspirasi, dan memimpin melalui keteladanan moral serta visi bersama (Nye, 2008). Dalam diri pemimpin seperti inilah kekuatan dan kekuasaan mencapai bentuknya yang paling luhur: sebagai sarana untuk melayani, bukan untuk menguasai.

Kekuasaan dalam realitas politik seringkali berkompromi dan tidak selalu absolut atau stagan terhadap konsep-konsep pemimpin ideal sebagaimana yang telah diuraikan. Konsep kekuasaan terus mengalami perubahan seiring dengan perkembangan masyarakat dan kondisi sosial yang ada. Dalam realitas politik, aktor-aktor yang berusaha memperoleh atau mempertahankan kekuasaan sering kali menghadapi situasi yang kompleks dan penuh ketidakpastian. Untuk itu, pendekatan pragmatis menjadi salah satu strategi utama dalam menjalankan politik. Pragmatisme dalam politik mengacu pada kecenderungan untuk menyesuaikan kebijakan dan tindakan politik dengan keadaan yang ada, tanpa terlalu terikat pada dogma atau ideologi tertentu (Dewey, 1931). Dengan kata lain, keputusan politik lebih banyak dipengaruhi oleh apa yang dianggap efektif dan dapat diterima oleh mayoritas, dibandingkan dengan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip yang kaku.

Pragmatisme merupakan strategi dalam berpolitik yang menempuh cara yang bersifat jangka pendek dan menguntungkan. Dalam masyarakat, pragmatisme akan dianggap positif apabila dalam praktiknya menggunakan cara yang efisien dalam memecahkan masalah. Namun, cara-cara tersebut akan menjadi negatif apabila dalam praktiknya disusupi praktik-praktik politik yang bersifat transaksional dan menguntungkan suatu pribadi atau kelompoknya saja (Marijan. 2006). Pragmatisme politik tidak mengenal fanatisme ideologi atau kesetiaan terhadap suatu partai atau golongan membuka ruang bagi setiap individu atau kelompok untuk bertindak sesuai dengan kepentingan dan tujuan politiknya semata.

Dalam sistem pemerintahan demokratis, kekuasaan terdistribusi di antara berbagai aktor politik yang memiliki kepentingan berbeda, sehingga proses pengambilan keputusan menjadi hasil dari negosiasi dan persaingan (Dahl, 1961). Namun, dalam praktiknya, banyak pemimpin atau kelompok politik yang mengadopsi pendekatan pragmatis, yaitu ketika kekuasaan digunakan secara fleksibel untuk

mencapai tujuan yang dianggap paling menguntungkan dalam situasi tertentu. Akibatnya, proses pengambilan keputusan politik cenderung bersifat pragmatis, yang mana membuat pemimpin atau partai politik harus menyeimbangkan berbagai kepentingan agar kebijakan yang dihasilkan dapat diterima oleh banyak pihak. Pragmatisme ini juga terlihat dalam praktik realpolitik, sebuah pendekatan yang mengutamakan kepentingan praktis dibandingkan dengan idealisme normatif. Otto von Bismarck, misalnya, dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan realpolitik dalam strategi diplomasi dan pemerintahan Jerman, dengan menekankan keseimbangan kekuasaan serta aliansi yang fleksibel untuk mencapai stabilitas nasional. Artinya, suatu keputusan kebijakan dapat diambil bukan berdasarkan semata-mata karena idealisme moral atau ideologi tertentu.

Pragmatisme juga berperan dalam pembentukan kebijakan publik, terutama dalam situasi ketika pemimpin harus menyesuaikan strategi mereka dengan realitas sosial dan ekonomi. Pragmatisme tidak hanya berlaku dalam filsafat atau ilmu pengetahuan, tetapi juga dalam politik, yaitu ketika pemimpin yang sukses adalah mereka yang mampu membaca situasi dan bertindak secara fleksibel untuk mencapai tujuan yang diinginkan (Rorty, 1989). Dalam konteks ini, pragmatisme menjadi alat penting bagi politisi untuk mengelola kekuasaan dan membangun konsensus tanpa terjebak dalam dogma yang dapat menghambat perubahan.

Pendekatan pragmatis dalam politik dapat menimbulkan dilema etis. Ketika pemimpin terlalu mengutamakan hasil jangka pendek tanpa mempertimbangkan prinsip moral atau dampak jangka panjang, pragmatisme dapat berubah menjadi oportunisme politik, yaitu ketika keputusan diambil hanya untuk mempertahankan kekuasaan tanpa memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam kondisi seperti ini, kebijakan yang seharusnya berorientasi pada kesejahteraan rakyat justru menjadi alat untuk mempertahankan dominasi politik, sering kali dengan mengorbankan transparansi, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokratis. Joseph Schumpeter mengkritik fenomena ini dengan menyatakan bahwa dalam politik modern, pemimpin cenderung lebih fokus pada strategi elektoral dan popularitas dibandingkan dengan perumusan kebijakan yang benar-benar berpihak pada rakyat. Akibatnya, praktik populisme dan

manipulasi wacana publik dapat muncul sebagai strategi pragmatis untuk mendapatkan dukungan, meskipun kebijakan yang dihasilkan tidak selalu memberikan solusi nyata terhadap permasalahan sosial dan ekonomi. Selain itu, pragmatisme yang berlebihan juga dapat mengikis kepercayaan publik terhadap institusi politik, karena masyarakat dapat melihat bahwa kebijakan yang diambil lebih didasarkan pada kepentingan elit daripada aspirasi kolektif. Oleh karena itu, meskipun pragmatisme dalam politik memiliki nilai penting dalam menghadapi tantangan yang dinamis, tanpa keseimbangan dengan prinsip moral dan etika politik, pendekatan ini dapat berubah menjadi alat yang justru merusak legitimasi dan stabilitas politik dalam jangka panjang.

Pragmatisme ini kemudian menjadi landasan bagi pemikiran Niccolò Machiavelli, yang menekankan bahwa dalam politik, efektivitas lebih penting daripada moralitas, dan pemimpin harus siap menggunakan berbagai strategi, termasuk tipu muslihat dan manipulasi, untuk mempertahankan kekuasaannya. Machiavelli berpendapat bahwa pemimpin yang ingin bertahan di dunia politik yang penuh intrik tidak dapat selalu berpegang pada norma-norma moral yang idealis, melainkan harus bersikap fleksibel dan mampu beradaptasi dengan situasi yang terus berubah. Oleh karena itu, kekuasaan, politik, dan pragmatisme saling berkaitan erat, mencerminkan bagaimana realitas politik sering kali ditentukan oleh kebutuhan untuk menyesuaikan strategi dengan keadaan yang terus berubah.

Pemikiran politik Niccolò Machiavelli, seorang tokoh kunci dalam sejarah teori politik, sering kali menimbulkan perdebatan dan kontroversi. Karya terkenal, “*Il Principe*” atau “*The Prince*”, telah menjadi salah satu referensi utama dalam studi politik sejak pertama kali diterbitkan pada awal abad ke-16. Dalam *Il Principe*, Machiavelli menyajikan panduan yang berfokus pada realitas politik yang keras dan sering kali tidak memperhatikan norma-norma moral tradisional. Alih-alih mengedepankan idealisme atau etika, Machiavelli menekankan pentingnya pragmatisme dan efisiensi dalam menjalankan kekuasaan (Machiavelli, 2006).

Machiavelli menekankan bahwa stabilitas negara lebih penting daripada reputasi moral seorang pemimpin, sehingga dalam beberapa keadaan, tindakan yang dianggap tidak bermoral, seperti penggunaan kekerasan, propaganda, atau

pengkhianatan, dapat dibenarkan jika bertujuan untuk menjaga ketertiban dan mencegah kekacauan. Pemikiran ini juga dikenal sebagai *raison d'état* atau "kepentingan negara", yang kemudian menjadi dasar bagi banyak pemimpin politik dalam sejarah yang mengadopsi pendekatan pragmatis dalam pemerintahan mereka (Skinner, 2000). Namun, ajaran Machiavelli juga memunculkan kontroversi karena dianggap membenarkan politik tanpa etika, bahwa pemimpin dapat melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya. Kritik terhadap pemikirannya datang dari filsuf seperti Jean-Jacques Rousseau, yang berargumen bahwa kepemimpinan harus tetap berlandaskan pada kontrak sosial dan nilai-nilai keadilan, bukan sekadar pada efektivitas dan kelangsungan kekuasaan (Rousseau, 1762).

Panduan politik pragmatis Machiavelli mencakup strategi-strategi yang melibatkan pengelolaan citra publik, penggunaan propaganda, dan manipulasi aliansi politik. Konsep seperti "tujuan membenarkan cara" dan kebijakan "lebih baik ditakuti daripada dicintai" mencerminkan pandangan Machiavelli bahwa kestabilan dan keberlangsungan kekuasaan sering kali memerlukan keputusan yang kontroversial. Menurutnya, seorang pemimpin harus mampu menilai situasi dengan cermat dan melakukan tindakan yang mungkin dianggap kejam atau tidak etis jika itu akan memastikan keamanan dan kekuatan negara. Meskipun, dalam konteks ini tindakan politik amoral itu juga dapat ditujukan untuk mempertahankan kekuasaan.

Pragmatisme ala Machiavelli dalam konteks kekuasaan menempatkan efektivitas sebagai prioritas utama dalam menjalankan pemerintahan. Dalam *The Prince*, Machiavelli menegaskan bahwa seorang pemimpin tidak boleh terikat oleh norma moral yang kaku, melainkan harus bersedia bertindak sesuai dengan kebutuhan situasi demi mempertahankan stabilitas dan kekuasaannya. Ia menekankan bahwa dunia politik adalah arena yang penuh ketidakpastian, karena lawan politik akan selalu mencari celah untuk melemahkan posisi seorang penguasa. Oleh karena itu, pemimpin yang baik bukanlah mereka yang selalu berbuat baik, tetapi mereka yang tahu kapan harus bertindak keras dan kapan harus bersikap lembut, tergantung pada kepentingan negara dan keberlanjutan kekuasaan. Hal ini bukan berarti penguasa harus menjadi tiran yang kejam, tetapi ia harus mampu menanamkan rasa hormat dan kewaspadaan

di antara rakyat dan lawan politiknya, sehingga mereka tidak berani menentang otoritasnya. Dalam konteks ini, kekuasaan yang stabil menurut Machiavelli bukan berasal dari popularitas semata, melainkan dari kemampuan seorang pemimpin dalam mengontrol situasi politik melalui ketegasan dan kewaspadaan strategis.

Pemikiran ini dapat dilihat dalam berbagai contoh kepemimpinan sepanjang sejarah yang memperlihatkan bahwa banyak pemimpin yang mengadopsi pendekatan Machiavellianisme untuk menjaga kekuasaannya. Dari Otto von Bismarck dengan kebijakan realpolitik-nya, hingga pemimpin modern yang menggunakan strategi komunikasi politik untuk membentuk opini publik dan mempertahankan citra mereka di hadapan rakyat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa dalam politik, pragmatisme tidak hanya menjadi alat untuk memperoleh kekuasaan, tetapi juga menjadi kunci untuk mempertahankan stabilitas pemerintahan di tengah tantangan yang terus berkembang (Bew, 2014).

Pandangan ini menantang gagasan-gagasan konvensional mengenai moralitas dalam kepemimpinan dan terus menjadi bahan diskusi intensif di kalangan akademisi dan praktisi politik hingga saat ini. Banyak yang melihat Machiavelli sebagai seorang pragmatis yang realistis, sementara yang lain menganggap pandangannya sebagai cerminan dari kebijakan yang berbahaya dan tidak berperikemanusiaan. Terlepas dari penilaian yang berbeda, *Il Principe* tetap menjadi karya yang penting dan relevan, menawarkan wawasan yang mendalam tentang dinamika kekuasaan dan strategi politik yang berfungsi dalam konteks yang penuh tekanan dan ketidakpastian. Buku ini telah mempengaruhi banyak pemikir dan pemimpin politik sepanjang sejarah, dan relevansinya terus berlanjut dalam analisis politik modern, menggugah pertanyaan mendalam tentang hubungan antara kekuasaan, moralitas, dan efektivitas dalam kepemimpinan.

Dalam konteks politik kontemporer yang tidak lagi beroperasi dalam kerangka kerajaan atau monarki absolut, pemikiran Machiavelli tetap menawarkan lensa analitis yang relevan untuk memahami dinamika kekuasaan modern. Struktur politik saat ini memang ditopang oleh institusi demokratis, mekanisme elektoral, serta rezim hukum yang lebih kompleks, namun pola kompetisi, negosiasi, dan strategi mempertahankan

kekuasaan tidak sepenuhnya berbeda dari apa yang digambarkan Machiavelli. Pergeseran bentuk pemerintahan tidak menghapus realitas politik yang menunjukkan adanya kebutuhan bagi seorang untuk dapat berkuasa dan mempertahankan kekuasaannya. Karena itu, teori Machiavellian kerap diadaptasi untuk menjelaskan praktik kekuasaan dalam demokrasi modern, termasuk dalam memahami bagaimana politisi kontemporer memadukan moralitas, pragmatisme, dan kalkulasi strategis ketika mempertahankan otoritas di tengah tekanan global, kompetisi elektoral, dan dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam konteks Indonesia, dinamika politik modern menunjukkan pola yang serupa dengan gambaran umum Machiavelli mengenai bagaimana kekuasaan dijalankan, dipertahankan, dan dinegosiasikan. Sejak memasuki era demokrasi pascareformasi, Indonesia menghadapi lanskap politik yang ditandai oleh sistem multipartai, koalisi pragmatis, dan kontestasi elektoral yang kompetitif. Dalam lingkungan seperti ini, kemampuan seorang pemimpin untuk membangun legitimasi, mengelola institusi, serta menavigasi hubungan dengan elit politik dan basis massa menjadi faktor penting dalam keberhasilan pemerintahannya. Joko Widodo, yang menjabat sebagai Presiden ketujuh Republik Indonesia sejak 2014, muncul sebagai figur sentral dalam dinamika tersebut. Berasal dari latar belakang politik lokal sebagai Wali Kota Surakarta dan Gubernur DKI Jakarta, Jokowi memposisikan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat melalui gaya komunikasi populis dan citra kesederhanaan. Kepemimpinannya di tingkat nasional sejak dua periode terakhir memperlihatkan bagaimana seorang aktor politik harus beradaptasi dengan kompleksitas sistem politik Indonesia, mulai dari membangun koalisi pemerintahan hingga menghadapi tekanan ekonomi dan sosial. Oleh karena itu, memahami konteks politik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menjadi penting sebelum mengaitkannya lebih jauh dengan teori Machiavellianisme

Sejak dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia pada 2014, Joko Widodo tampil sebagai figur politik baru yang menawarkan harapan perubahan melalui agenda reformasi birokrasi dan pembangunan nasional. Dalam berbagai kebijakannya, ia menunjukkan kecenderungan untuk menyesuaikan strategi politiknya dengan situasi

yang ada, sebuah ciri khas dari pragmatisme politik. Sebagai contoh, dalam perjalanan politiknya dari Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga menjadi Presiden, Jokowi membangun citra sebagai pemimpin populis yang dekat dengan rakyat, menggunakan strategi blusukan sebagai alat komunikasi politik yang efektif. Ia memperoleh reputasi sebagai pemimpin yang merakyat dan fokus pada reformasi birokrasi (Kipp, 2018). Namun, ketika ia telah mengamankan posisinya di puncak kekuasaan, pendekatannya berubah menjadi lebih strategis dan adaptif, sebagaimana yang diajarkan oleh Machiavelli bahwa pemimpin harus bersedia menyesuaikan metode kepemimpinannya dengan kondisi yang dihadapinya.

Dalam periode kekuasaan Jokowi sebagai presiden, kritik utama yang sering muncul meliputi pengelolaan kekuasaan dan konsolidasi politik. Kritikus mengamati bahwa Jokowi cenderung memperkuat kekuasaan eksekutif dan mengurangi ruang bagi oposisi politik. Beberapa pengamat berpendapat bahwa Jokowi menggunakan kekuasaannya untuk mengontrol dan memanipulasi institusi politik demi mempertahankan stabilitas dan dukungan politik (Hidayat, 2022). Langkah-langkah ini, meskipun mungkin diperlukan untuk menjaga stabilitas politik, juga mencerminkan elemen-elemen dari pendekatan Machiavellian yang mengutamakan strategi politik yang pragmatis di atas idealisme.

Salah satu manifestasi dari strategi ini adalah kecenderungan untuk melakukan deinstitutionalisasi, yaitu ketika lembaga-lembaga negara seperti Mahkamah Konstitusi, KPK, dan aparat penegak hukum kehilangan independensinya akibat intervensi politik dan penempatan loyalis di posisi strategis. Deinstitutionalisasi merujuk pada proses pelemahan fungsi, peran, dan otonomi lembaga-lembaga formal negara yang seharusnya menjalankan prinsip *checks and balances* (sistem pengawasan antar lembaga). Dalam konteks pemerintahan Joko Widodo, proses ini tampak melalui berbagai penunjukan figur-figur yang dikenal dekat secara personal maupun politik dengan presiden untuk menduduki jabatan strategis di institusi kunci negara.

Contoh paling menonjol terkait deinstitutionalisasi yang dilakukan oleh Jokowi terjadi dalam Mahkamah Konstitusi, khususnya dalam kasus Putusan MK No. 90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimum calon wakil presiden. Putusan ini

membuka jalan bagi pencalonan Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, sebagai cawapres Prabowo Subianto. Yang menjadi sorotan adalah fakta bahwa Ketua MK saat itu, Anwar Usman, merupakan ipar Jokowi. Meskipun akhirnya Anwar Usman dinyatakan melanggar etik oleh Majelis Kehormatan MK (MKMK) dan diberhentikan dari jabatannya, kasus ini menjadi simbol keterlibatan eksekutif dalam memengaruhi lembaga yudikatif. Hal ini memperlihatkan bahwa lembaga yang seharusnya independen dari pengaruh kekuasaan justru menjadi instrumen dalam strategi pelanggaran kekuasaan.

KPK juga mengalami pelemahan serius. Revisi UU KPK pada 2019 yang disahkan di bawah pemerintahan Jokowi telah mengubah struktur lembaga antirasuah tersebut menjadi bagian dari lembaga eksekutif, menjadikannya tidak lagi independen secara fungsional. Pimpinan KPK yang baru dianggap lebih patuh terhadap kekuasaan, bahkan diwarnai kontroversi etik dan lemahnya kinerja pemberantasan korupsi. Banyak pihak menilai bahwa revisi tersebut merupakan bentuk pelemahan sistematis terhadap upaya-upaya pengawasan terhadap elit politik dan kekuasaan negara (Pribadi & Simatupang, 2025).

Selain itu, aparat penegak hukum seperti kepolisian juga dipandang semakin berperan dalam agenda politik negara ketimbang menjaga netralitas dan supremasi hukum. Fenomena seperti penggunaan aparat untuk membatasi gerakan masyarakat sipil, membungkam demonstrasi, hingga membiarkan praktik disinformasi yang menguntungkan pemerintah, menjadi bagian dari pola yang lebih besar dalam upaya mengendalikan ruang publik. Melalui proses ini, kekuasaan negara tidak lagi dibatasi oleh institusi formal, melainkan dijalankan melalui jejaring kekuasaan informal yang loyal terhadap eksekutif (Haripin & Siregar, 2018).

Aspek lainnya tentang pragmatisme Jokowi yang mencerminkan pemikiran Machiavelli adalah kemampuannya dalam membangun dan mempertahankan koalisi politik yang luas menangani oposisi, serta dalam strategi-strategi yang digunakannya untuk mempertahankan dukungan politik dan legitimasinya (Hasyim, 2021). Pada awal kepemimpinannya, Jokowi diusung oleh partai yang relatif kecil dalam peta politik nasional, yakni PDI-P, dan menghadapi oposisi kuat dari koalisi besar lawan

politiknya. Namun, alih-alih bertahan dalam posisi yang konfrontatif, ia memilih untuk menarik berbagai kekuatan politik ke dalam koalisinya, termasuk partai-partai yang sebelumnya menjadi oposisi. Hal ini menunjukkan pemahamannya bahwa dalam politik, musuh hari ini bisa menjadi sekutu besok, sesuai dengan prinsip Machiavellian bahwa pemimpin harus mampu mengendalikan lawan melalui kooptasi atau aliansi yang strategis (Skinner, 1981).

Selain itu, terdapat kekhawatiran mengenai transparansi dan praktik demokrasi di bawah kepemimpinan Jokowi. Tercatat, meskipun Jokowi mengklaim mempromosikan pemerintahan yang bersih, terdapat indikasi bahwa ia menggunakan kekuasaan untuk menekan lawan politik dan mengontrol media. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang sejauh mana prinsip-prinsip demokrasi dan transparansi benar-benar diterapkan dalam praktik pemerintahan Jokowi (Pratama, 2023). Penggunaan citra publik merupakan elemen kunci dalam analisis ini. Jokowi dikenal dengan kemampuannya membangun citra publik yang positif dan merakyat. Dalam konteks ini, ia mungkin menggunakan strategi yang mirip dengan yang disarankan oleh Machiavelli untuk mempertahankan dukungan politik dan menghadapi tantangan. Dengan memproyeksikan dirinya sebagai pemimpin yang dekat dengan rakyat dan berkomitmen pada reformasi, Jokowi berhasil menciptakan citra yang mendukung stabilitas politik dan legitimasi pemerintahannya (Tomsa, 2020). Namun, strategi ini juga bisa dianggap sebagai taktik untuk mengalihkan perhatian dari masalah-masalah mendasar dalam pemerintahan dan menutupi kekurangan dalam implementasi kebijakan.

Namun, sebagaimana yang diperingatkan Machiavelli, pragmatisme yang terlalu dominan juga dapat menimbulkan risiko, terutama jika masyarakat mulai melihat kebijakan politik lebih sebagai alat mempertahankan kekuasaan daripada sebagai bentuk pelayanan kepada rakyat. Hal ini tampak dalam kritik terhadap Jokowi, terutama dalam hubungannya dengan elit politik dan bisnis, yang dianggap semakin jauh dari citra populis yang ia bangun di awal kariernya. Konsolidasi kekuasaan melalui penunjukan orang-orang dekat di posisi strategis, peran kuat oligarki dalam ekonomi, serta manuver politik seperti dinasti politik dan revisi undang-undang untuk

kepentingan stabilitas pemerintahan, mencerminkan bagaimana pragmatisme dapat berkembang menjadi strategi politik jangka panjang yang mengutamakan stabilitas kekuasaan di atas kepentingan demokrasi yang ideal.

Dalam konteks ini, Jokowi dapat dikatakan menerapkan pragmatisme politik Machiavellian dalam versi yang lebih halus, yaitu dengan tetap menjaga citra sebagai pemimpin rakyat, tetapi di saat yang sama melakukan manuver politik yang bertujuan untuk mempertahankan stabilitas dan kesinambungan kekuasaan. Ini menunjukkan bahwa dalam politik modern, prinsip-prinsip Machiavelli tetap relevan, yaitu pemimpin yang sukses bukan hanya mereka yang idealis, tetapi juga yang mampu beradaptasi, membangun aliansi strategis, serta menggunakan kebijakan publik sebagai alat untuk memperkuat legitimasi politiknya.

Pemilu 2024 menjadi bukti nyata bagaimana pragmatisme politik Jokowi berperan dalam membentuk lanskap politik nasional. Dengan keterbatasan aturan yang tidak memungkinkan dirinya untuk mencalonkan kembali, Jokowi memilih strategi mendukung calon yang dapat melanjutkan proyek politiknya, termasuk melalui manuver politik yang memperkuat posisi para sekutunya dalam pemerintahan. Dukungan terhadap calon tertentu, rekonsiliasi dengan tokoh-tokoh politik yang sebelumnya menjadi rival, serta konsolidasi kekuatan di berbagai institusi pemerintahan menunjukkan bahwa Jokowi tetap mempertahankan pendekatan pragmatis dalam memastikan warisan politiknya tetap bertahan. Hal ini menguatkan relevansi pemikiran Machiavelli dalam politik kontemporer, yaitu fakta bahwa kepemimpinan yang efektif bukan hanya tentang memerintah selama mungkin, tetapi juga tentang bagaimana mempertahankan pengaruh dalam jangka panjang melalui strategi yang adaptif dan fleksibel.

Ketegangan antara Presiden Joko Widodo dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), partai yang mengusungnya sejak awal karier politik nasional, mulai tampak jelas menjelang akhir masa jabatan keduanya. Meskipun hubungan mereka sebelumnya tampak solid, terutama selama dua periode pencalonan presiden yang didukung langsung oleh Megawati Soekarnoputri, friksi mulai muncul saat Jokowi menunjukkan kecenderungan untuk membangun pusat kekuasaan politiknya

sendiri di luar dominasi PDI-P. Titik balik krusial terjadi saat pencalonan Gibran Rakabuming Raka—putra Jokowi—sebagai calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto pada Pemilu 2024. Langkah ini bukan hanya tidak melibatkan restu PDI-P secara formal, tetapi juga bertentangan dengan keputusan partai yang telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres resmi mereka.

Perpecahan ini menunjukkan adanya relasi yang asimetris antara Jokowi dan PDI-P. Ketika kekuasaan politik yang awalnya saling menopang berubah menjadi tarik-menarik antara loyalitas partai dan kepentingan kekuasaan personal. Jokowi yang semula diposisikan sebagai "petugas partai" oleh PDI-P, secara bertahap memperluas otonomi politiknya melalui konsolidasi kekuasaan eksekutif dan dukungan dari partai-partai non-PDI-P, seperti Golkar, PAN, dan Gerindra. Sikap ini menimbulkan respons keras dari internal PDI-P, termasuk sinyal ketidakharmonisan dari Megawati yang menyatakan bahwa partai tidak ingin dijadikan sekadar alat elektoral, serta kritik terbuka terhadap praktik politik dinasti yang diasosiasikan dengan Jokowi.

Relasi yang memburuk ini menandai pergeseran orientasi politik Jokowi yang semakin menunjukkan karakteristik pragmatisme Machiavellian. Dalam upaya mempertahankan pengaruh pasca-kepresidenan, Jokowi tampak membangun aliansi kekuasaan yang tidak lagi bertumpu pada satu partai, melainkan pada jaringan loyalis dan struktur birokrasi yang telah ia bentuk selama dua periode pemerintahannya. Ketegangan ini mencerminkan transformasi Jokowi dari sosok yang diangkat oleh kekuatan partai menjadi pemimpin yang memanfaatkan kekuasaan negara untuk menciptakan kekuatan politik sendiri. Dengan demikian, konflik antara Jokowi dan PDI-P tidak semata-mata soal pencalonan, tetapi mencerminkan konflik kepentingan antara strategi kekuasaan yang terpusat pada tokoh dengan struktur partai yang menuntut ketaatan ideologis.

Upaya Jokowi dalam reformasi birokrasi dan pembangunan infrastruktur dapat dilihat sebagai bagian dari strategi yang lebih luas untuk mengkonsolidasikan kekuasaan dan meningkatkan legitimasi pemerintahannya. Meskipun tujuan-tujuan ini, seperti peningkatan efisiensi birokrasi dan perbaikan infrastruktur, berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat, mereka juga berfungsi untuk memperkuat posisi politik

Jokowi. Dalam kerangka Machiavellian, ini mencerminkan bagaimana langkah-langkah yang tampaknya untuk kebaikan umum juga dapat digunakan untuk memperkuat kekuasaan politik dan memastikan dukungan berkelanjutan (Magar, 2021; Pratama, 2023). Upaya ini, meskipun mungkin berorientasi pada kemajuan masyarakat, juga menunjukkan bahwa Jokowi mungkin menggunakan strategi politik yang pragmatis dan sering kali manipulatif untuk mengatasi tantangan politik dan memperkuat legitimasi pemerintahannya.

Secara keseluruhan, analisis ini menunjukkan bahwa meskipun Jokowi mengadopsi citra sebagai pemimpin yang bersih dan transparan, elemen-elemen dari praktik politiknya dapat menunjukkan kesamaan dengan prinsip-prinsip Machiavellian. Hal ini mencerminkan ketegangan antara citra publik yang positif dan strategi politik pragmatis yang diterapkan untuk mencapai dan mempertahankan kekuasaan dalam konteks politik yang kompleks.

Permasalahan yang muncul adalah adanya ketidaksesuaian antara citra awal Jokowi sebagai pemimpin yang merakyat, bersih, dan idealis, dengan berbagai kebijakan serta keputusan politik yang dianggap sarat dengan nuansa pragmatis. Contohnya adalah pemilihan tokoh-tokoh tertentu dalam kabinet, pendekatan terhadap elite politik, serta keputusan untuk mencalonkan Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres pada Pemilu 2024, yang memicu kontroversi mengenai etika dan politik dinasti. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan penting: apakah Jokowi telah mengadopsi prinsip-prinsip Machiavellisme dalam praktik politiknya?

Laurentius Atu (2024), dalam penelitiannya yang berjudul *Pembacaan Pragmatisme Machiavelli Atas Fenomena Propaganda Politik Pascakebenaran Di Indonesia*, menunjukkan bagaimana strategi komunikasi politik di era Jokowi sangat Machiavellian. Dalam politik pascakebenaran, kebenaran dan moralitas kerap dikorbankan demi tujuan politik, sejalan dengan pandangan Machiavelli bahwa kekuasaan dapat diraih dan dipertahankan dengan segala cara, termasuk manipulasi, kebohongan, dan eksploitasi identitas. Penulis mengidentifikasi tiga ciri utama propaganda semacam ini: orientasi pada kepentingan pribadi/kelompok, pengabaian nilai dan norma, serta pengutamaan kemenangan politik di atas segalanya. Fenomena

ini dinilai merusak tatanan demokrasi karena menjadikan rakyat dan lawan politik sekadar alat untuk meraih kekuasaan.

Jurnal yang berjudul “*Perspektif Ideologi dan Kekuasaan dalam Pemikiran Machiavelli: Studi Kasus Pemilihan Umum Presiden 2019*” karya Haura Atthahara meneliti bagaimana isu agama dijadikan sebagai strategi politik praktis untuk memperoleh kekuasaan, dengan merujuk pada teori kekuasaan Niccolò Machiavelli. Dalam perspektif Machiavelli, kekuasaan harus diraih dan dipertahankan dengan segala cara, termasuk dengan menginstrumentalisasi moralitas dan agama. Dalam konteks Pilpres 2019, narasi seperti “penista agama”, “kriminalisasi ulama”, dan isu khilafah digunakan untuk memecah belah pemilih berdasarkan sentimen keagamaan. Penelitian ini menilai bahwa praktik tersebut merusak esensi demokrasi, menciptakan fragmentasi sosial, dan mengikis budaya toleransi, sekaligus memperlihatkan relevansi pemikiran Machiavelli dalam membaca dinamika politik kekuasaan di Indonesia.

Pandangan-pandangan pada penelitian sebelumnya yang mengidentifikasi Jokowi sebagai sosok Machiavellian diperkuat penelitian Yohanes Sulaiman (2024) yang menilai warisan Jokowi sebagai “kompleks”—stabil di permukaan, tapi mengikis fondasi demokrasi. Ben Bland dalam bukunya *Man of Contradictions* bahkan menyebut Jokowi sebagai sosok paradoksal yang merakyat secara simbolik namun otoriter dalam praktik kekuasaan.

Berbagai studi sebelumnya telah mengulas kepemimpinan Jokowi dari sisi kebijakan publik, pencitraan media, maupun hubungan kekuasaan. Namun, belum banyak kajian yang secara eksplisit mengkaji praktik politik Jokowi dalam bingkai teori Machiavellisme. Berdasarkan berbagai uraian tersebut, terdapat celah dalam kajian akademik yang belum secara eksplisit mengaitkan praktik politik Jokowi sepanjang 2014–2024 dengan kerangka teoritik politik pragmatisme Machiavellisme. Padahal, pendekatan Machiavellian memberikan perspektif yang tajam dalam memahami bagaimana kekuasaan dijalankan secara pragmatis, taktis, dan kadang manipulatif dalam sistem demokrasi. Pemikiran Niccolò Machiavelli menekankan bahwa politik harus dilihat secara realistis dan kekuasaan dapat dijustifikasi melalui cara apa pun demi stabilitas dan tujuan negara. Oleh karena itu, studi ini berupaya

mengisi celah literatur dengan mengaitkan praktik politik Jokowi sepanjang 2014–2024 dengan prinsip-prinsip Machiavellisme.

Pentingnya topik ini terletak pada kontribusinya terhadap pemahaman baru mengenai praktik kekuasaan dalam demokrasi Indonesia kontemporer. Di satu sisi, pragmatisme politik dapat dilihat sebagai bentuk kecakapan dalam mengelola realitas politik yang kompleks. Namun di sisi lain, kecenderungan ini juga dapat mengaburkan batas antara etika dan kepentingan kekuasaan, serta memunculkan pertanyaan mengenai kualitas demokrasi yang sedang dibangun. Dengan menganalisis praktik Jokowi dalam perspektif Machiavellisme, diharapkan penelitian ini mampu memberikan wawasan kritis terhadap dinamika politik nasional dan menjadi bahan refleksi dalam mengawal demokrasi yang sehat.

Dengan mempertimbangkan dinamika politik di Indonesia, pendekatan pragmatisme dalam kekuasaan sebagaimana yang diajarkan oleh Machiavelli tampak menjadi strategi utama dalam kepemimpinan Joko Widodo. Mulai dari membangun koalisi luas, mengadopsi kebijakan populis, hingga melakukan konsolidasi kekuasaan, semua langkah tersebut mencerminkan bahwa dalam realitas politik, efektivitas sering kali mengungguli idealisme. Fenomena ini menunjukkan bagaimana pragmatisme politik tidak hanya menjadi alat bagi pemimpin untuk bertahan di tengah persaingan politik yang ketat, tetapi juga dapat membentuk struktur kekuasaan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik politik pragmatisme dalam kepemimpinan Joko Widodo melalui perspektif Machiavellianisme, guna memahami bagaimana strategi kekuasaan dijalankan dalam konteks politik Indonesia kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam kajian ilmu politik, khususnya dalam memahami hubungan antara pragmatisme, kekuasaan, dan stabilitas politik dalam pemerintahan modern.

1.2 Rumusan Masalah

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana praktik Politik Pragmatisme dalam Perspektif Machiavellisme pada Kepemimpinan Presiden Joko Widodo Tahun 2014-20124

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis politik pragmatis Joko Widodo sepanjang Tahun 2014-2024 dan kaitannya dengan ajaran politik Machiavelli

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini dapat menambah pemahaman tentang bagaimana teori politik Niccolò Machiavelli diaplikasikan untuk menganalisis kepemimpinan modern seperti Joko Widodo. Hal ini memperkaya kajian teori Machiavelli dalam konteks kepemimpinan kontemporer di Indonesia.
- 2) Penelitian ini menunjukkan relevansi teori politik klasik dengan fenomena politik masa kini, khususnya dalam memahami gaya kepemimpinan yang berorientasi pada pragmatisme, adaptasi, dan populisme.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi masyarakat secara umum hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat dalam memahami gaya kepemimpinan Joko Widodo yang ditinjau dari perspektif teori politik Machiavelli
2. Bagi para praktisi politik, Penelitian ini dapat menjadi bahan masukan bagi pemimpin, termasuk Joko Widodo atau pemimpin lainnya, untuk mengevaluasi gaya kepemimpinan mereka. Pemimpin dapat memahami bagaimana persepsi generasi muda, khususnya mahasiswa, terhadap strategi dan keputusan yang mereka ambil.
3. Bagi mahasiswa dan generasi muda penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan tentang gaya kepemimpinan yang ditinjau dari perspektif Niccolo Machiavelli untuk kemudian dapat menjadi panduan dalam kehidupan nyata,

termasuk strategi kepemimpinan yang efektif dan adaptif dalam menghadapi tantangan politik.

4. Bagi civitas akademika hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi perpustakaan yang dapat dimanfaatkan sebagai referensi pada penelitian berikutnya dan dapat memperkaya khazanah keilmuan ilmu sosial khususnya tentang gaya kepemimpinan Jokowi yang ditinjau dari perspektif teori politik Machiavelli

1. 5 Kerangka Teori

1.5.1 Teori Politik Machiavelli (Machiavellianisme)

Niccolò Machiavelli, seorang filsuf dan ahli politik yang hidup pada masa Renaissance Italia, menyusun salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran politik, *Il Principe* pada Tahun 1532. Buku ini menawarkan panduan praktis bagi penguasa tentang bagaimana memperoleh, mempertahankan, dan memperluas kekuasaan. Pemikiran Machiavelli yang pragmatis dan sering kali dianggap tidak bermoral ini mencerminkan realitas politik yang kompleks, menjadikan *Il Principe* sebagai landasan teoritik untuk menganalisis praktik politik di berbagai era, termasuk era modern.

Machiavelli (1532) menegaskan bahwa pemimpin harus memahami realitas politik, yang sering kali tidak sesuai dengan standar moral ideal. Ia menyatakan bahwa tindakan tidak bermoral dapat dibenarkan jika itu diperlukan untuk melindungi negara atau mencapai tujuan politik tertentu. Dalam pandangan Machiavelli, politik bukanlah arena untuk mempertahankan moralitas absolut, melainkan medan yang memerlukan fleksibilitas dan keputusan yang sulit. Dalam praktiknya, realitas politik di atas moralitas mencerminkan gagasan bahwa pemimpin harus mampu mengutamakan kepentingan negara di atas prinsip-prinsip etika pribadi.

Pragmatisme menjadi hal yang mendasar dalam filsafat politik Machiavelli, menantang pendekatan teoretis dan etis. Dukungannya terhadap penolakan idealisme yang tidak perlu, realisme, dan kompromi terlihat jelas dalam tulisannya tentang kepemimpinan, pemerintahan, konflik, dan kehidupan politik. Machiavelli

mengecualikan nilai-nilai moral dasar seperti kejujuran, keadilan, dan integritas dari politik (Nustadi, 2020). Pragmatismenya berarti menyatakan bahwa batasan moral hanya bergantung pada keberhasilan kekuasaan politik, bukan pada potensi aturan moral. Meskipun pragmatisme politik Machiavelli, seperti akumulasi kekuasaan, menipu lawan, dan menghilangkan musuh, mungkin bertentangan dengan moralitas tradisional, persepsinya tentang moralitas bergantung pada hasil pragmatis dari tindakan politik. Oleh karena itu, pragmatisme menjadi pendekatan fundamental dalam kehidupan politik bagi para pemimpin atau penguasa.

Teori politik Machiavelli menandakan politik pragmatis secara historis, dengan penekanan pada realisme dan kekuasaan. Konsep "*virtù*" dan "*fortuna*" bukan sekadar alat politik; keduanya melambangkan kualitas kompleks yang diperlukan untuk meraih kemenangan politik. *virtue*, yang berasal dari kata Italia "*Virtù*", adalah keseluruhan keterampilan, strategi, dan kecerdikan seorang politisi. Kemampuan seorang penguasa untuk menavigasi berbagai seluk-beluk dan tantangan politik bergantung pada kemampuan tersebut untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sementara itu, "*fortuna*," atau keberuntungan, mewakili kekuatan yang tidak dapat dikendalikan, tidak terduga, dan eksternal yang berada di luar pengaruh seorang penguasa, tetapi menentukan nasib mereka. Machiavelli mengakui peran penting nasib dalam keberhasilan politik. Dengan demikian, kedua istilah ini melambangkan dimensi penting dari filosofi politik Machiavelli, membentuk jembatan konseptual antara efektivitas pribadi dan keberuntungan dalam bidang politik. Selain itu, pandangan Machiavelli tentang kebajikan menunjukkan pentingnya kecerdikan dan kebijaksanaan praktis dalam memperoleh kekuasaan politik. Penekanan ini menolak idealisme, mengakui interaksi dinamis antara tindakan yang disengaja dan kejadian kebetulan dalam menentukan hasil seorang penguasa. Pemisahan yang jelas antara kebajikan dan keberuntungan menunjukkan keseimbangan rumit yang diperlukan untuk kepemimpinan politik yang sukses.

Pemisahan antara kebajikan dan keberuntungan dalam filosofi Machiavelli mengarah pada pemahaman hasil politik sebagai keseimbangan antara kualitas individu dan konsekuensi eksternal. *Virtù* mencakup agensi individu, pemikiran strategis, dan

kontrol langsung atas tindakan politik. Sebaliknya, fortuna berkaitan dengan peristiwa yang tidak terduga di luar manajemen dan kontrol manusia (Borja, 2016). Dengan demikian, dualitas ini membentuk saran Machiavelli bahwa para pemimpin politik harus bersiap menghadapi kemungkinan buruk saat mereka berusaha untuk mencapai kekuasaan. Penempatan yang efektif dan tindakan yang tepat waktu yang dipandu oleh virtù dapat memungkinkan mereka untuk memanfaatkan peluang dan ancaman dari fortuna. Oleh karena itu, para pengambil keputusan memerlukan kebijaksanaan praktis dan kesiapan untuk menyeimbangkan virtù dan fortuna, dengan efektif bernavigasi dalam kerangka politik yang kompleks.

Menurut Machiavelli, tujuan utama seorang pemimpin adalah mempertahankan kekuasaan dan stabilitas negara. Untuk itu, penguasa harus bersedia menggunakan segala cara, termasuk manipulasi, propaganda, dan bahkan kekerasan, asalkan tindakan tersebut memastikan keberlangsungan pemerintahan. Bagi Machiavelli, tindakan-tindakan ini tidak hanya dianggap perlu, tetapi juga merupakan kewajiban moral seorang pemimpin untuk melindungi negara dari ancaman internal maupun eksternal. Machiavelli juga menyebutkan bahwa seorang pemimpin tidak perlu selalu melakukan tindakan bermoral, tetapi harus pandai menciptakan kesan bahwa dirinya adalah pribadi yang bermoral di hadapan publik. Realitas politik sering kali memaksa pemimpin untuk membuat kompromi yang tidak normatif demi tujuan yang lebih besar.

Niccolò Machiavelli menyoroti pentingnya legitimasi berbasis massa dalam politik. Dalam *Il Principe*, Machiavelli mengidentifikasikan ketegangan antara kaum elite dan rakyat sebagai faktor utama dalam dinamika politik. Machiavelli menegaskan bahwa kepemimpinan yang bertumpu pada dukungan rakyat lebih stabil dibandingkan yang hanya bergantung pada elite karena rakyat memiliki kepentingan sederhana seperti keamanan dan kesejahteraan, sementara elite sering kali memiliki ambisi pribadi yang dapat mengancam kestabilan pemerintahan. Dalam perspektif teori politik, pemikiran ini berkaitan dengan konsep legitimasi dan stabilitas rezim ketika seorang pemimpin yang memahami dinamika kekuasaan antara elite dan rakyat lebih mampu mempertahankan otoritasnya. Selain itu, Machiavelli menekankan bahwa

pemimpin harus berhati-hati dalam mengelola hubungan dengan elite, karena mereka lebih berpotensi melakukan pengkhianatan jika kepentingan mereka tidak terpenuhi. Dalam konteks politik modern, gagasan ini relevan dalam memahami bagaimana pemimpin populis membangun basis kekuasaan melalui legitimasi rakyat dan bagaimana mereka menavigasi hubungan dengan elite untuk menjaga stabilitas pemerintahan.

Dalam aspek kekuasaan, Machiavelli memperkenalkan konsep-konsep yang menjadi ciri khas pemikirannya, seperti penggunaan kekejaman yang terukur, kedermawanan yang strategis, dan keseimbangan antara rasa takut dan cinta dari rakyat. Penguasa yang efektif, menurutnya, tidak harus selalu bertindak moral tetapi harus mampu memberikan kesan moralitas kepada rakyatnya. Dalam hal ini, Machiavelli menyarankan agar penguasa meniru sifat singa yang kuat untuk menakuti musuh dan rubah yang cerdik untuk menghindari jebakan lawan (Marshall dan Brown, 2020). Kombinasi sifat ini memungkinkan penguasa bertahan di tengah ancaman internal maupun eksternal.

Manipulasi politik, menurut Machiavelli, mencakup kemampuan untuk mengontrol opini publik dan membangun narasi yang menguntungkan penguasa. Propaganda digunakan untuk menciptakan legitimasi di mata rakyat dan menanamkan keyakinan bahwa pemimpin bekerja demi kebaikan mereka, meskipun tindakan di balik layar mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai moral tradisional. Selain itu, Machiavelli tidak ragu mendukung penggunaan kekerasan sebagai sarana terakhir untuk menyingkirkan musuh politik atau menekan pemberontakan yang dapat mengancam stabilitas politik negara.

Buku *Il Principe* menceritakan bagaimana Cesare Borgia menggunakan kekejaman terukur untuk menghancurkan lawan-lawannya dan menegaskan kekuasaannya di wilayah Romagna. Dalam analisis Machiavelli, tindakan semacam ini bukanlah bentuk tirani tanpa tujuan, melainkan langkah strategis untuk mengonsolidasikan kekuasaan dan menciptakan kestabilan politik jangka panjang. Dengan demikian, Machiavelli menyarankan bahwa pemimpin yang efektif harus

memiliki fleksibilitas moral dan keberanian untuk mengambil tindakan sulit demi melindungi kekuasaannya.

Machiavelli berpendapat bahwa seorang penguasa harus menepati janji selama hal itu menguntungkan. Namun, jika situasi berubah, dan menepati janji justru membahayakan kepentingan negara atau kekuasaannya, maka penguasa harus memiliki keberanian untuk melanggarnya. Machiavelli tidak memandang ini sebagai bentuk kejahatan, melainkan sebagai tindakan pragmatis yang diperlukan dalam politik. Seorang pemimpin yang ingin mempertahankan kekuasaan tidak selalu terikat untuk mematuhi kata-katanya, terutama ketika janji tersebut merugikan dirinya atau ketika alasan yang mendasarinya sudah tidak relevan.

Machiavelli mendasarkan argumen ini pada realitas politik: dunia politik penuh dengan pengkhianatan, kepentingan pribadi, dan perebutan kekuasaan. Dalam lingkungan seperti ini, seorang penguasa yang terlalu terikat pada nilai-nilai moral akan rentan diserang oleh mereka yang tidak bermain dengan aturan yang sama. Penguasa yang bijaksana harus mampu melanggar janji jika situasi menuntut, tetapi tetap menjaga citra moralitasnya di hadapan rakyat. Oleh karena itu, fleksibilitas dan kemampuan untuk beradaptasi menjadi nilai utama dalam kepemimpinan.

Machiavelli menyatakan bahwa seorang pemimpin lebih baik ditakuti daripada dicintai jika harus memilih, karena rasa takut dianggap lebih dapat diandalkan dalam menjaga ketaatan rakyat. Menurutnya, cinta bersifat rapuh karena bergantung pada hubungan timbal balik yang bisa berubah ketika situasi menjadi sulit. Sebaliknya, rasa takut didasarkan pada ancaman hukuman, yang cenderung membuat rakyat tetap patuh meskipun mereka tidak menyukai pemimpin mereka. Namun, Machiavelli menekankan bahwa rasa takut harus dijaga dalam batas-batas yang rasional dan tidak boleh berubah menjadi kebencian.

Lebih lanjut, Machiavelli memperingatkan bahaya kebijakan yang menimbulkan kebencian rakyat, seperti perampasan properti atau penghinaan terhadap martabat mereka. Ia juga menekankan pentingnya menjaga reputasi melalui tindakan-tindakan monumental dan seleksi penasihat yang kompeten dan setia. Penguasa harus

memberikan penghargaan yang sesuai untuk menjaga loyalitas, tetapi juga waspada terhadap potensi pengkhianatan yang dapat menggoyahkan kekuasaan.

Pemimpin harus mengelilingi dirinya dengan penasihat yang kompeten dan setia, memastikan bahwa mereka memiliki pemahaman yang mendalam tentang situasi dan tantangan politik yang dihadapi. Penasihat ini berperan sebagai sumber informasi dan ide yang dapat membantu pemimpin membuat keputusan yang strategis. Namun, Machiavelli menekankan bahwa penguasa tidak boleh sepenuhnya bergantung pada penasihat; keputusan akhir harus tetap berada di tangan pemimpin untuk menjaga otoritas dan integritasnya. Selain itu, konsolidasi kekuasaan membutuhkan langkah-langkah yang tegas, termasuk penghancuran struktur lama atau elemen-elemen yang dapat mengancam legitimasi dan stabilitas penguasa baru. Tindakan ini, meskipun tampak keras, sering kali diperlukan untuk menciptakan fondasi kekuasaan yang kokoh dan menghilangkan potensi ancaman yang berasal dari sistem lama.

Machiavelli membedakan dua jenis negara utama: monarki dan republik. Dalam *Il Principe*, fokus utamanya adalah pada monarki, khususnya monarki turun-temurun dan monarki yang diperoleh melalui penaklukan atau akuisisi politik. Monarki turun-temurun relatif lebih stabil karena adanya kesinambungan tradisi dan loyalitas rakyat kepada dinasti penguasa. Sebaliknya, monarki baru menghadapi tantangan besar, termasuk resistansi rakyat dan ancaman dari kekuatan politik lama. Untuk mengatasi tantangan ini, Machiavelli menyarankan langkah-langkah seperti penghancuran struktur lama, pembentukan aliansi strategis, atau tinggal secara langsung di wilayah yang baru dikuasai (Skinner, 2000).

Dalam konteks penguasaan wilayah yang sebelumnya merdeka, Machiavelli menekankan perlunya penghancuran total struktur politik lama atau pemberian otonomi terbatas di bawah kendali penguasa (Strauss, 1958). Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa rakyat yang pernah merasakan kebebasan cenderung sulit menerima kekuasaan baru, kecuali jika tradisi dan kebiasaan lama mereka dihancurkan atau dimodifikasi secara signifikan. Dengan demikian, penguasa baru harus mengadopsi strategi yang tidak hanya represif tetapi juga adaptif.

Machiavelli juga membahas pentingnya kemampuan pribadi dan strategi dalam memimpin. Penguasa yang hanya bergantung pada keberuntungan (*fortuna*), seperti Cesare Borgia, cenderung gagal mempertahankan kekuasaan mereka dalam jangka panjang. Sebaliknya, penguasa yang mengandalkan kemampuan dan keahlian strategi dapat menciptakan fondasi kekuasaan yang kokoh. Kemampuan ini mencakup kecakapan dalam seni perang, pengelolaan pemerintahan, serta manipulasi politik untuk menghadapi situasi yang terus berubah.

Niccolò Machiavelli menawarkan pandangan mendalam tentang peran agama sebagai alat dan sumber kekuasaan politik. Dalam analisisnya, Machiavelli menggambarkan negara-negara gerejawi sebagai entitas politik yang luar biasa stabil karena otoritas mereka berakar pada agama. Dalam konteks ini, agama tidak hanya menjadi keyakinan spiritual, tetapi juga instrumen strategis yang memungkinkan pemimpin memobilisasi dukungan, menciptakan legitimasi, dan mempertahankan kekuasaan.

Agama, bagi Machiavelli, berfungsi sebagai fondasi kekuasaan yang kuat karena ia beroperasi di tingkat moral dan psikologis masyarakat. Negara-negara gerejawi, seperti Negara Kepausan, memanfaatkan otoritas spiritual untuk mendapatkan ketaatan rakyat. Dalam politik, ini mencerminkan bagaimana keyakinan kolektif dapat menciptakan stabilitas yang bahkan tidak memerlukan kekuatan militer atau ekonomi yang besar. Dengan kata lain, agama menjadi mekanisme legitimasi yang efektif karena sulit digugat dan cenderung abadi. Ini menunjukkan bagaimana agama, dapat menjadi alat pragmatis dalam perebutan dan pemeliharaan kekuasaan. Dalam pengertian ini, agama berfungsi sebagai kombinasi antara legitimasi normatif dan kekuatan praktis.

Pandangan Machiavelli tentang kebajikan, keberuntungan, dan pragmatisme merupakan dimensi mendasar dari teori politiknya. Melalui *virtù*, ia mendorong para politisi untuk memiliki kualitas yang penting untuk kepemimpinan yang cerdas dan pemikiran strategis, yang sangat penting untuk efektivitas politik. Dengan *fortuna*, ia mengakui batasan yang ada dalam kontrol manusia dan implikasi dari elemen yang tidak terduga terhadap hasil politik. Oleh karena itu, pragmatisme menjadi penting,

dengan fokus pada konsekuensi politik daripada mengikuti etika tradisional. Secara keseluruhan, konsep-konsep ini menunjukkan perjalanan Machiavelli untuk merumuskan kerangka kerja yang membimbing kepemimpinan politik yang praktis dan efektif, yang rentan terhadap kompleksitas dan ketidakpastian realitas. Oleh karena itu, tulisannya tetap relevan saat politik di seluruh dunia menghadapi tantangan yang memerlukan pendekatan politik yang dapat beradaptasi dan realistis.

1.5.2 Teori Pragmatisme

Teori pragmatisme memandang bahwa kebenaran suatu ide atau kebijakan harus diukur berdasarkan dampak praktisnya dalam kehidupan nyata. Dalam konteks politik, pendekatan ini menolak prinsip-prinsip ideologis yang kaku dan lebih mengedepankan fleksibilitas serta penyesuaian terhadap kondisi sosial yang dinamis.

Kata ‘pragmatis’ sendiri sudah menjadi bagian dari kosakata sehari-hari. Istilah yang sepadan dengan pragmatis adalah *practical* (praktis) dan *realistic* (realistis). Dapat diartikan, pragmatis berarti mencoba menerapkan berbagai macam ide dan melihat bagaimana ide-ide tersebut berhasil diterapkan secara praktis untuk merealisasikan tujuan seseorang dengan terbuka (*open minded*) dan fleksibel, serta tidak terpaku pada dogma tertentu (Munitz, 1981).

Charles Sanders Peirce, sebagai pelopor pragmatisme klasik, memperkenalkan konsep *Pragmatic Maxim*, yang menyatakan bahwa makna suatu konsep atau kebijakan hanya dapat dipahami melalui konsekuensi praktisnya. Peirce menekankan bahwa pengambilan keputusan politik sebaiknya didasarkan pada pengalaman empiris dan observasi terhadap hasil nyata di lapangan, bukan pada doktrin atau teori yang tidak teruji secara praktis (Peirce, 1992).

Dalam karyanya, Peirce menyatakan bahwa doktrin yang menjadi keyakinan seseorang dapat menimbulkan keraguan untuk bertindak dan mengambil keputusan (Andriani, 2017). Pierce menjabarkan metode yang menjadi dasar dari pragmatisme sebagai pertentangan untuk mengatasi keraguan terhadap suatu ideologi, doktrin atau keyakinan tertentu. Berikut merupakan metode-metode tersebut :

- a. *The Method Of Tenacity* (metode keteguhan), yaitu pendekatan yang melibatkan keyakinan yang kuat dan tidak goyah pada suatu pendapat atau kepercayaan. Meskipun mungkin ada bukti atau argumen yang bertentangan, seseorang yang menggunakan metode ini akan tetap mempertahankan pendapatnya dengan keras, bahkan jika itu berarti menolak bukti yang jelas atau akal sehat
- b. *The a Priori Method* (metode apriori), atau metode pengembangan opini yang secara alami mengalir begitu saja dan kebenarannya bersifat sangat subjektif. Metode ini bisa dipahami dalam kerangka bagaimana opini atau ide-ide populis seringkali dibangun berdasarkan asumsi atau keyakinan yang diterima secara luas oleh sebagian besar masyarakat, tanpa melalui pembuktian empiris atau evaluasi berbasis data yang kuat.
- c. *The Method of Science* (metode pengetahuan), yaitu metode yang berasaskan pada investigasi. Metode inilah yang terpercaya menurut Charles Peirce, sebab pengambilan keputusan yang didasarkan pada proses rasional, logis, dan empiris. Metode ini Berbeda dengan pendekatan lain seperti metode a priori (yang mengandalkan asumsi atau prinsip dasar tanpa bukti) atau pendekatan yang sepenuhnya bergantung pada spekulasi metafisik.

William James, yang memperluas pandangan pragmatisme, berpendapat bahwa kebenaran suatu ide terletak pada manfaatnya dalam kehidupan nyata. Menurut James, suatu kebijakan tidak perlu selalu konsisten secara teoritis, selama kebijakan tersebut mampu mencapai efek yang diinginkan dalam praktik sosial (James, 1907). Dengan demikian, pragmatisme berfungsi sebagai alat evaluatif terhadap kebijakan politik, diukur dari efektivitas dan relevansinya, bukan dari konsistensinya dengan prinsip teori tertentu.

Dalam buku *Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking* (1907) karya William James, terdapat penjabaran terkait pragmatism sebagai kerangka evaluatif terhadap gagasan politik. Ide atau keyakinan tidak bisa diklaim benar hanya karena tradisi, otoritas, atau logika formal, tetapi harus dibuktikan melalui pengalaman nyata dan konsekuensi praktisnya. James menolak pandangan absolut atau ideologi

tertutup (Anti-dogmatisme) yang berimplikasi pada pluralisme ideologi, keterbukaan terhadap revisi kebijakan, serta anti-fundamentalisme politik.

Pluralisme ideologi pada kerangka pragmatisme menekankan bahwa tidak ada satu ideologi yang mutlak benar untuk semua konteks. Ideologi hanya dianggap sah apabila dapat membawa manfaat nyata bagi kehidupan sosial dan politik. Pandangan ini membuat pemangku kebijakan dapat merevisi dan mengadaptasi kebijakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan, bukan dogma ideologis semata.

Sementara Fundamentalisme politik meyakini bahwa ideologi atau pandangan politik tertentu adalah mutlak benar, anti-fundamentalisme politik mendorong fleksibilitas, dialog, dan kompromi. Pandangan ini dapat menjadi dasar bagi kelompok-kelompok ideologi yang berbeda, bahkan berlawanan, untuk berkoalisi atas dasar pragmatisme kepentingan politik.

John Dewey, yang menerapkan pragmatisme dalam konteks demokrasi dan kebijakan publik, berpendapat bahwa demokrasi bukanlah sistem yang statis, melainkan sebuah eksperimen sosial yang terus berkembang. Dewey menekankan pentingnya pengalaman kolektif dan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan politik untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan kebutuhan riil masyarakat (Dewey, 1954).

Richard Rorty membawa pragmatisme ke dalam ranah postmodernisme dengan menolak pandangan bahwa ada kebenaran absolut dalam politik. Bagi Rorty, kebijakan politik harus dinilai berdasarkan kegunaannya dalam konteks sosial tertentu, bukan pada kesetiaannya terhadap fondasi ideologis yang tetap (Rorty, 1989). Politik, menurut Rorty, harus bersifat fleksibel dan adaptif, mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan sosial yang terus berubah.

Para pemikir pragmatis seperti Charles Sanders Peirce, John Dewey, dan William James menekankan pentingnya pengujian kebijakan melalui hasil nyata dan partisipasi aktif masyarakat yang didasarkan pada kerangka etis dan praktis. Tokoh-tokoh tersebut menolak relativisme moral dan justru membangun kerangka etis yang kokoh dalam kerangka pragmatisme. Akan tetapi, pada pengembangan pragmatisme, terdapat juga pandangan yang lebih oportunistik atau realis mengenai penerapan

prinsip-prinsip pragmatisme dalam kehidupan khususnya dalam konteks politik. Konsep pragmatisme ini lebih menekankan pada penerapan prinsip-prinsip pragmatisme dalam politik berdasarkan hasil konkret dan kepentingan praktis dalam situasi yang ada tanpa mengutamakan moralitas sebagai kerangka etis.

Carl Schmitt, seorang pemikir politik terkemuka, menggambarkan pandangan pragmatisme realis ini dengan menekankan bahwa dalam politik, penguasa harus siap membuat keputusan-keputusan yang keras dan deterministik, bahkan dalam keadaan darurat, jika itu diperlukan untuk mempertahankan kedaulatan dan stabilitas negara. Schmitt mengajukan bahwa politik adalah soal kedaulatan dan keputusan yang menentukan nasib suatu bangsa, yang seringkali harus diambil tanpa mengindahkan norma moral yang biasa diterima oleh masyarakat. Dalam karyanya *The Concept of the Political* (1932), Schmitt berpendapat bahwa dalam kondisi ekstrem, yang terpenting bukanlah mengikuti hukum atau etika konvensional, melainkan kemampuan penguasa untuk menghadapi ancaman politik dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan, meskipun hal tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip moral yang berlaku dalam masyarakat (Schmitt, 2007). Pandangan Schmitt ini memperlihatkan bagaimana pragmatisme dalam politik dapat mengambil bentuk yang lebih oportunistik, dengan menekankan tindakan yang realistis dan efektif demi menjaga kekuasaan.

Schmitt sangat skeptis terhadap politik normatif atau moralistik, yang menurutnya cenderung menutupi realitas kekuasaan. Ia menyatakan bahwa politik selalu tentang keputusan konkret dalam situasi konkret, bukan tentang penerapan prinsip universal atau ideal yang tak tergoyahkan. Dalam hal ini, Schmitt bersikap pragmatis dalam arti menolak utopia. Ia mengakui bahwa dunia politik penuh dengan ketidakpastian yang membuat penguasa perlu diberi ruang untuk mengambil keputusan tanpa terikat oleh prosedur yang terlalu kaku.

Konsep *decisionisme*, yakni keyakinan bahwa keputusan politik lebih penting daripada norma hukum itu sendiri. Dalam buku *Politische Theologie* (1922) yang ditulis oleh Carl Schmitt menegaskan bahwa "*Souverän ist, wer über den Ausnahmezustand entscheidet*"—yang berarti "*Berdaulat adalah dia yang memutuskan dalam keadaan darurat.*" Konsep ini menunjukkan pendekatan pragmatis

terhadap kekuasaan, bahwa legitimasi tidak semata-mata berasal dari legalitas, tetapi dari kemampuan aktor politik untuk membuat keputusan efektif dalam situasi krisis. Dalam konteks pragmatisme, pendekatan ini sejalan dengan gagasan bahwa praktik nyata, respons terhadap keadaan konkret, dan konsekuensi dari tindakan politik lebih penting daripada koherensi ideologis atau legal formal. Schmitt secara implisit menyatakan bahwa dalam kondisi luar biasa, keberhasilan tindakan politik diukur dari kemampuannya menyelamatkan tatanan sosial, bukan dari kesetiaannya pada prinsip-prinsip normatif.

Hans Morgenthau, tokoh utama dalam teori realisme politik internasional, menjelaskan lebih lanjut mengenai konsep pragmatisme oportunistik. Dalam bukunya *Politics Among Nations* (1948), Morgenthau berpendapat bahwa kebijakan luar negeri negara harus dipandu oleh kepentingan kekuasaan dan bukan oleh prinsip moral atau nilai-nilai universal. Morgenthau menyatakan bahwa dalam politik internasional, negara harus bertindak dengan cara yang memaksimalkan kekuatan dan memajukan kepentingan nasionalnya, bahkan jika tindakan tersebut mengabaikan nilai-nilai moral. Dalam pandangan ini, tujuan negara membenarkan segala cara, yang artinya tindakan yang mungkin bertentangan dengan norma-norma etika atau hukum internasional dapat dibenarkan jika itu melayani kepentingan negara dalam jangka panjang. Pendekatan ini menggambarkan bagaimana pragmatisme realis sering kali mengutamakan stabilitas politik, kekuasaan, dan kepentingan praktis, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan terhadap prinsip moral atau ideologi tertentu (Morgenthau, 1948).

1.6 Operasionalisasi Konsep

Tabel 1.1 Operasionalisasi Konsep

Konsep	Definisi Konseptual	Definisi Operasional	Indikator
Pragmatisme Politik	Pendekatan dalam tindakan dan	Praktik politik Joko Widodo yang	1. Fleksibilitas Ideologi (Anti-dogmatism) • Tidak terpaku pada ideologi atau doktrin politik tertentu.

	pengambilan keputusan politik yang didasarkan pada pertimbangan praktis dan hasil nyata, bukan semata-mata pada ideologi, prinsip moral, atau doktrin tertentu.	cenderung mengutamakan kepentingan praktis dan efisien ketimbang kesetiaan terhadap ideologi, nilai, norma, atau koalisi tertentu.	• Bersikap adaptif sesuai konteks politik dan kebutuhan praktis. • Membangun koalisi politik lintas partai, termasuk dengan oposisi. • Kebijakan tidak selalu konsisten dengan garis partai pengusung.
			2. Orientasi Hasil (Orientation on Result) • Fokus pada pencapaian nyata (output konkret). • Mengutamakan efektivitas daripada kesetiaan ideologis. • Legitimasi politik diperoleh melalui hasil pembangunan (infrastruktur, ekonomi, dll.). • Hasil praktis dijadikan strategi untuk memperkuat dukungan publik.
			3. Konsolidasi Kekuasaan (Oportunistik) • Penempatan loyalis di lembaga strategis negara. • Melemahkan independensi lembaga pengawasan (contoh: revisi UU KPK, intervensi MK). • Kooptasi lawan politik melalui koalisi besar. • Mengutamakan stabilitas kekuasaan dibanding prinsip demokratis.
			4. Populisme Pragmatis • Kebijakan populis yang berorientasi pada kebutuhan masyarakat bawah. • Menggunakan simbol-simbol kerakyatan untuk membangun legitimasi. • Mengikat dukungan publik melalui pencitraan pro-rakyat.
			5. Otoritarianisme

			• Membatasi ruang gerak oposisi melalui instrumen kekuasaan. • Penggunaan aparat untuk mengendalikan demonstrasi/aksi publik. • Mengurangi ruang kebebasan sipil dan kontrol media. • Memperkuat dominasi eksekutif atas mekanisme checks and balances.
			6. Pengelolaan Citra Publik • Menggunakan media dan propaganda untuk membentuk citra positif. • Menciptakan kesan sebagai pemimpin sederhana, bersih, dan merakyat. • Menutupi praktik oportunistik melalui komunikasi politik. • Mempertahankan legitimasi dengan strategi simbolik dan narasi publik.
Machiavellianisme	Konsep pemikiran dari Niccolò Machiavelli yang menekankan pentingnya kekuasaan, kelicikan, dan manipulasi dalam mencapai tujuan politik.	Strategi dan kebijakan Jokowi yang mencerminkan sikap manipulatif, penggunaan citra, serta upaya mempertahankan kekuasaan dengan cara yang oportunis.	1. Manipulasi Politik • Menggunakan tipu daya dan strategi tersembunyi untuk mempertahankan kekuasaan. • Mengubah kebijakan sesuai kepentingan politik praktis. • Memanfaatkan hukum atau regulasi untuk melemahkan lawan. • Melanggar janji politik bila dianggap merugikan kekuasaan.
			2. Propaganda & Citra

			• Menggunakan media dan komunikasi untuk mengontrol opini publik. • Membentuk citra pemimpin sederhana, bersih, dan merakyat. • Menggunakan narasi politik untuk menutupi kelemahan kebijakan. • Mengalihkan isu publik melalui strategi komunikasi.
			3. Kekuasaan melalui Rasa Takut • Lebih memilih ditakuti daripada dicintai (sesuai pandangan Machiavelli). • Menggunakan aparat untuk menekan oposisi dan kelompok kritis. • Membatasi ruang kebebasan sipil. • Menanamkan kewaspadaan agar lawan politik tidak berani menentang.
			4. Nepotisme & Dinasti Politik • Penempatan anggota keluarga dalam jabatan politik strategis. • Pencalonan Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution sebagai elite politik. • Menciptakan jejaring politik berbasis keluarga. • Memperkuat legitimasi melalui dukungan politik dinasti.
			5. Pelemahan Institusi • Intervensi terhadap Mahkamah Konstitusi (contoh: kasus batas usia cawapres).

			• Revisi UU KPK yang melemahkan independensi lembaga antikorupsi. • Penempatan loyalis di institusi strategis. • Menurunkan efektivitas sistem checks and balances.
			6. Kooptasi Lawan Politik • Merangkul partai oposisi ke dalam koalisi pemerintahan. • Menjadikan musuh politik sebagai sekutu untuk mengurangi ancaman. • Menawarkan posisi kekuasaan sebagai alat kompromi. • Membangun koalisi besar demi stabilitas politik jangka panjang.

1.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif yang bertujuan memahami fenomena secara mendalam melalui penafsiran terhadap data verbal, teks, dan konteks sosial Creswell (2014). Penelitian kualitatif berfokus pada eksplorasi makna yang diberikan individu atau kelompok terhadap suatu masalah sosial sehingga sangat relevan untuk mengkaji praktik kekuasaan dan dinamika politik. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi, tetapi juga untuk menelusuri faktor-faktor penyebab (*causal explanation*) yang melatarbelakangi munculnya suatu peristiwa atau gejala sosial. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti menggali makna, nilai, serta pola interaksi yang tersembunyi di balik suatu fenomena, dengan berfokus pada konteks dan subjektivitas.

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi pustaka, yaitu teknik pengumpulan data yang bersumber dari berbagai literatur tertulis seperti buku, jurnal

ilmiah, laporan penelitian, artikel akademik, dokumen resmi, serta sumber digital kredibel lainnya. Studi pustaka memungkinkan peneliti memperoleh landasan teoretis, temuan empiris, dan perspektif analitis yang relevan dengan topik penelitian tanpa melakukan pengumpulan data lapangan. Menurut Zed (2014), studi pustaka merupakan proses sistematis yang mencakup identifikasi, evaluasi, dan sintesis literatur untuk membangun kerangka konseptual yang kuat. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menelusuri perkembangan gagasan, memperbandingkan hasil penelitian sebelumnya, serta merumuskan analisis yang lebih komprehensif berdasarkan kajian mendalam terhadap berbagai sumber tertulis.

Dalam penelitian ini, pemahaman menjadi aspek utama, peneliti berupaya menafsirkan dunia sosial sebagaimana yang dipahami oleh subjek penelitian. Penelitian kualitatif lebih mengutamakan interpretasi dan narasi daripada angka atau statistik. Deskripsi yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif bersifat mendalam, menyeluruh, dan kontekstual, yang oleh Clifford Geertz (1973) disebut sebagai *thick description*. Deskripsi semacam ini tidak hanya menjelaskan apa yang terjadi, tetapi juga mengungkap alasan dan makna di balik tindakan, perilaku, atau simbol yang diamati. Dengan demikian, pendekatan ini sangat cocok digunakan dalam penelitian yang bertujuan memahami ide, pemikiran, atau praktik sosial secara holistik dan mendalam.

1.7.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari desk research atau studi kepustakaan (*library research*) serta internet research. Kedua teknik tersebut merupakan metode yang efektif untuk memperoleh data sekunder yang relevan dan komprehensif tanpa memerlukan pengumpulan data primer melalui observasi atau wawancara langsung.

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan teknik pengumpulan data yang berfokus pada penggunaan sumber-sumber literatur tertulis yang dapat diakses melalui berbagai platform, seperti buku referensi, artikel jurnal ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, dan publikasi lainnya. Melalui teknik ini, peneliti dapat mengeksplorasi teori-teori yang ada, hasil penelitian sebelumnya, serta pemikiran-

pemikiran yang relevan dengan topik penelitian yang sedang dikaji. Peneliti melakukan seleksi kritis terhadap sumber-sumber tersebut untuk menyusun kerangka teori dan memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Studi kepustakaan memberikan dasar yang kuat untuk memahami konteks teoritis dan konseptual dari masalah penelitian, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam literatur yang ada

Selain itu, internet research adalah teknik pengumpulan data yang memanfaatkan sumber daya informasi yang tersedia di internet, seperti artikel ilmiah yang dipublikasikan dalam jurnal online, laporan penelitian, dokumen pemerintah, serta publikasi dari institusi dan organisasi internasional. Teknik ini memberikan keuntungan aksesibilitas yang lebih luas dan cepat terhadap berbagai jenis literatur yang tidak selalu tersedia dalam format fisik. Internet research memungkinkan peneliti untuk memperoleh informasi terkini dan relevan yang dapat mendukung argumen penelitian, serta memperkaya wawasan peneliti tentang perkembangan terbaru dalam bidang yang diteliti. Dengan demikian, penggunaan internet sebagai sumber data memungkinkan peneliti untuk memperluas cakupan referensi dan memperoleh perspektif yang lebih global dalam memahami fenomena yang dikaji

1.7.2 Teknis Analisis Data

Dalam penelitian kepustakaan ini, teknik analisis data yang diterapkan bersifat kualitatif dan interpretatif. Data yang diperoleh dari berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen lainnya, dianalisis dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam untuk mengidentifikasi pola, hubungan, serta pemahaman terhadap fenomena yang sedang dikaji. Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali makna, hubungan antarvariabel, dan wawasan yang tersirat dalam sumber-sumber pustaka yang digunakan.

Langkah pertama dalam proses analisis adalah pengorganisasian dan pengelompokan data berdasarkan tema atau topik utama yang relevan dengan fokus penelitian. Data yang telah dikelompokkan selanjutnya dianalisis untuk menemukan pola atau hubungan yang signifikan. Selanjutnya, dilakukan interpretasi terhadap data

yang diperoleh, yang mencakup pemahaman mendalam mengenai makna dari setiap informasi yang dikumpulkan serta kaitannya dengan teori yang ada. Peneliti kemudian melakukan analisis tematik, yakni identifikasi tema-tema utama yang muncul dalam literatur yang dianalisis, untuk menggali pola atau perspektif yang berulang dalam berbagai sumber yang relevan.

Proses ini juga melibatkan pembangunan kerangka teori yang berfungsi untuk menjelaskan atau meramalkan fenomena yang diteliti, serta melakukan perbandingan temuan dari berbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai topik yang dibahas. Hasil dari analisis ini pada akhirnya digunakan untuk merumuskan argumen dan kesimpulan yang dapat memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian. Proses analisis dilakukan dengan pendekatan yang kritis dan teliti, untuk memastikan bahwa temuan yang dihasilkan adalah hasil dari pemahaman yang mendalam terhadap data pustaka yang ada (Sujarweni, 2014; Zed, 2008).

1.7.3 Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi sasaran kajian dalam sebuah penelitian. Subjek utama pada penelitian ini adalah kepemimpinan Joko Widodo sebagai seorang aktor politik yang menjabat sebagai Presiden Negara Republik Indonesia pada periode 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian terhadap Joko Widodo sebagai subjek penelitian ini tidak hanya terbatas pada kebijakannya sebagai seorang presiden, tetapi juga akan berfokus pada praktik politik serta citra publik yang ditampilkan.

1.7.4 Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan fokus utama yang menjadi sasaran pengkajian dalam suatu penelitian. Dalam penelitian ini, objek yang diteliti adalah praktik politik Presiden Joko Widodo selama periode pemerintahannya dari tahun 2014 hingga 2024, yang dianalisis melalui perspektif teori politik Niccolò Machiavelli, khususnya dalam konteks pragmatisme dan strategi kekuasaan.

Penelitian ini menempatkan Joko Widodo sebagai figur sentral yang merepresentasikan pemimpin modern dengan gaya politik yang cenderung pragmatis, adaptif, dan populis. Objek ini mencakup berbagai kebijakan, tindakan politik, serta

strategi kekuasaan yang diterapkan oleh Joko Widodo dalam mempertahankan stabilitas politik, membangun aliansi kekuasaan, serta mengelola persepsi publik melalui pencitraan dan konsolidasi kekuatan. Tindakan-tindakan tersebut akan dianalisis menggunakan pendekatan teoritik Machiavelli dengan buku *Il Principe* (Sang Pangeran) sebagai sumber utamanya.

Dengan demikian, objek penelitian ini bersifat konseptual dan empiris. Secara konseptual, penelitian ini bertumpu pada teori politik Machiavelli yang menekankan pentingnya pragmatisme dalam mempertahankan kekuasaan. Secara empiris, objek penelitian mengarah pada praktik-praktik konkret dalam kepemimpinan Joko Widodo yang menunjukkan bagaimana teori Machiavelli dapat diaplikasikan dalam konteks politik Indonesia kontemporer.

1.7.5 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari berbagai referensi yang relevan dan dapat dipercaya, yang mendukung analisis terhadap praktik politik pragmatisme yang diterapkan oleh Presiden Joko Widodo selama periode 2014-2024, serta kaitannya dengan perspektif Machiavellisme. Sumber data primer untuk penelitian ini adalah Buku *Il Principe* karya Niccollo Machiavelli. Kemudian penelitian ini juga didukung dengan data sekunde yang diperoleh melalui teknik desk research atau studi kepustakaan, yang melibatkan pengumpulan dan analisis literatur yang tersedia.

Adapun sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Buku Teori Politik sebagai sumber utama yang digunakan adalah buku-buku yang membahas teori-teori politik, khususnya mengenai Machiavellisme dan pragmatisme. Buku-buku tentang pragmatisme politik juga digunakan untuk menjelaskan bagaimana praktik politik pragmatisme diterapkan dalam konteks pemerintahan. Selain itu, literatur tentang teori politik kontemporer dan kebijakan politik Indonesia turut digunakan untuk memberikan konteks lokal terkait dengan fenomena yang diteliti.
- 2) Jurnal Ilmiah dan Artikel Akademik yang dipublikasikan dalam jurnal-jurnal internasional maupun nasional menjadi sumber penting dalam penelitian ini. Artikel-artikel yang membahas penerapan teori Machiavellisme dalam politik

modern, serta kajian tentang pragmatisme dalam sistem politik Indonesia, sangat relevan untuk memperkaya analisis dan memberikan perspektif yang lebih dalam mengenai fenomena yang dikaji. Jurnal-jurnal ini juga memberikan data sekunder yang digunakan untuk membandingkan praktik politik yang dilakukan oleh Jokowi dengan prinsip-prinsip teoritis yang ada.

- 3) Laporan dan dokumen resmi dari pemerintahan Indonesia, termasuk laporan tahunan dan publikasi kebijakan dari Presiden Joko Widodo, digunakan untuk memberikan gambaran konkret mengenai kebijakan-kebijakan yang diambil selama periode 2014-2024. Laporan-laporan ini mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan ekonomi, politik luar negeri, dan kebijakan sosial yang mencerminkan penerapan pragmatisme dalam praktik pemerintahan Jokowi.
- 4) Artikel berita dan media massa yang diterbitkan, baik nasional maupun internasional, menjadi salah satu sumber data untuk memahami bagaimana praktik politik Jokowi dipersepsikan oleh masyarakat, pengamat politik, serta media. Artikel-artikel ini memberikan analisis dan wawasan tentang kebijakan-kebijakan yang menunjukkan karakteristik politik pragmatisme, serta bagaimana persepsi publik terhadap langkah-langkah politik yang diambil oleh Presiden Joko Widodo.
- 5) Sumber digital yang tersedia di internet, termasuk e-books, artikel online, dan laporan-laporan yang diterbitkan oleh organisasi internasional atau lembaga riset terkait. Internet research memungkinkan peneliti untuk mengakses informasi yang lebih terkini dan memperluas jangkauan referensi, serta memperoleh data yang relevan mengenai perkembangan politik Indonesia dan praktik pragmatisme yang diterapkan oleh Jokowi dalam konteks politik global.
- 6) Disertasi dan skripsi yang mengkaji topik serupa, baik mengenai politik Indonesia, Machiavellisme, maupun pragmatisme dalam politik, juga dijadikan sebagai sumber data untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam. Penelitian-penelitian sebelumnya memberikan pandangan yang dapat digunakan sebagai pembandingan dan referensi dalam menyusun argumen serta membangun kerangka teori dalam penelitian ini.